

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan dalam upaya pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sifat penelitian lapangan. Teknik pengumpulan informasi dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam hal ini telah melaksanakan kegiatan Pengawasan dan penindakan pelacuran dan perbuatan asusila, yang dimana dalam melakukan pengawasan dan penindakan tersebut membentuk tim khusus untuk melakukan kegiatan pengawasan dan penindakan. Dalam hal kecenderungan, kebijakan pengawasan dan penindakan tersebut sangat didukung oleh masyarakat dan juga dari tim pelaksana kebijakan pengawasan dan penindakan tersebut. Dalam melakukan penindakan pihak satuan polisi pamong praja melakukan penindakan secara langsung dan penindakan tidak langsung yang dimana dalam melakukan penindakan langsung pihak satpol pp turun ke lapangan untuk mengamankan pihak-pihak yang diduga melakukan tindakan pelacuran dan perbuatan asusila dan dalam penindakan tidak langsung satuan polisi pamong praja mengirimkan surat teguran kepada tempat-tempat yang diduga dijadikan tempat praktek asusila. Sedangkan untuk pengawasan pihak satpol pp juga menerapkan pengawasan langsung dan tidak langsung yang dimana dalam melakukan pengawasan tidak langsung pihak satpol pp melakukan pengamatan dengan bantuan informasi dari masyarakat sekitar. Sedangkan untuk pengawasan langsung pihak satpol pp melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang diduga menjadi tempat praktek asusila, terutama lokasi eks lokalisasi yang ada di Kota Jambi. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Pengawasan dan penindakan pihak satpol pp masih kesulitan menyampaikan informasi mengenai kebijakan pengawasan dan penindakan ini kepada masyarakat dan juga kepada oknum yang terlibat dalam praktik asusila, serta kekurangan sumber daya manusia dalam hal ini petugas yang melakukan Pengawasan dan penindakan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, pengawasan dan penindakan

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of supervision and enforcement policies in an effort to eradicate prostitution and immoral acts in Jambi City. The research method used is qualitative research with the nature of field research. Information collection techniques are carried out by interviews, field observations and literature. The results of the study indicate that the Jambi City Civil Service Police Unit in this case has carried out supervision and prosecution of prostitution and immoral acts, which in carrying out supervision and prosecution formed a special team to carry out surveillance and prosecution activities. In terms of trends, the monitoring and enforcement policies are strongly supported by the community and also from the team implementing the monitoring and enforcement policies. In taking action, the civil service police unit takes direct and indirect action where in carrying out direct action the Satpol PP goes to the field to secure parties suspected of committing acts of prostitution and immoral acts and in indirect action the civil service police unit send a warning letter to places suspected of being used as places of immoral practice. As for the supervision, the Satpol PP also applies direct and indirect supervision where in carrying out indirect supervision the Satpol PP makes observations with the help of information from the surrounding community. Meanwhile, for direct supervision, the Satpol PP carried out direct checks on locations suspected of being places of immoral practices, especially the location of the former localization in Jambi City. Obstacles encountered in the implementation of the supervision and enforcement policies of the Satpol PP are still having difficulty conveying information regarding this supervision and enforcement policy to the public and also to persons involved in immoral practices, as well as the lack of human resources in this case officers who carry out supervision and action to eradicate prostitution. and immorality

Keywords: policy implementation, monitoring and enforcement